



## Determinan Dana Pihak Ketiga di 34 Provinsi Indonesia

**Imelda Habeahan<sup>1\*</sup>, Selamet Rahmadi<sup>2</sup>, Rahma Nurjanah<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup>Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Indonesia

*\*Penulis Korespondensi : [imeldahabeahan0903@gmail.com](mailto:imeldahabeahan0903@gmail.com)*

**Abstract.** This study aims to: (1) identify and analyze the development of Third Party Funds (DPK), inflation, savings interest rates, Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant prices, and regional expenditure across Indonesian provinces during 2019–2023; and (2) examine the influence of inflation, savings interest rates, GRDP at constant prices, and regional expenditure on Third Party Funds in the same period. The research employs panel data regression analysis using EViews 12 for data processing. The results show that (1) the highest average growth of Third Party Funds (DPK) was recorded in South Kalimantan (11.89%), while the lowest was in Banten (-10.87%). The highest average inflation occurred in East Java (3.7%) and the lowest in Papua (2.1%). The savings interest rate peaked in 2019 at 1.17% and declined to its lowest level in 2022 at 0.37%. The highest GRDP growth was found in North Maluku (16.41%) and the lowest in West Papua (1.16%). Similarly, North Maluku also recorded the highest regional expenditure growth (14.08%), while West Papua experienced the lowest (-17.24%), reflecting economic disparities across regions in Indonesia. (2) The regression analysis reveals that GRDP at constant prices and regional expenditure have a significant and positive effect on Third Party Funds, while the savings interest rate has a significant and negative effect. In contrast, inflation shows no significant effect on Third Party Funds.

**Keywords:** GRDP; Inflation; Regional Expenditure; Savings Interest Rate; Third Party Funds.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan menganalisis perkembangan Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Suku Bunga Tabungan, PDRB Atas Harga Konstan, Belanja Daerah di Provinsi Indonesia tahun 2019-2023, 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh Inflasi, Suku Bunga Tabungan, PDRB Atas Harga Konstan, dan Belanja Daerah terhadap Dana Pihak Ketiga di Provinsi Indonesia tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang menggunakan eviews 12 sebagai pengolah data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Rata-rata perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) tertinggi terdapat di Kalimantan Selatan (11,89%) dan terendah di Banten (-10,87%). Rata-rata inflasi tertinggi berada di Jawa Timur (3,7%) dan terendah di Papua (2,1%). Suku bunga tabungan tertinggi tercatat pada 2019 sebesar 1,17% dan terendah pada 2022 sebesar 0,37%. PDRB harga konstan tertinggi terdapat di Maluku Utara (16,41%) dan terendah di Papua Barat (1,16%). Sementara itu, perkembangan belanja daerah tertinggi juga dicapai Maluku Utara (14,08%) dan terendah Papua Barat (-17,24%), mencerminkan adanya disparitas ekonomi antarwilayah di Indonesia. 2) Berdasarkan hasil regresi secara simultan variabel PDRB atas harga konstan dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Dana Pihak Ketiga, sedangkan Suku Bunga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Dana Pihak Ketiga, lalu Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga.

**Kata kunci:** Belanja Daerah; Dana Pihak Ketiga; Inflasi; PDRB; Suku Bunga Tabungan.

### 1. PENDAHULUAN

Uang memiliki peranan fundamental dalam perekonomian sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan pengukur yang memengaruhi seluruh aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam konteks kebijakan moneter, Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas nilai rupiah melalui instrumen moneter yang berdampak langsung pada sektor keuangan dan perbankan. Salah satu indikator utama dalam sistem perbankan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu dana masyarakat yang dihimpun oleh bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. DPK mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan serta menjadi sumber utama bagi bank dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan regional.

Data menunjukkan adanya ketimpangan DPK antarprovinsi. Provinsi DKI Jakarta mencatat DPK sebesar Rp3.864 triliun pada 2021 dan meningkat menjadi Rp4.461 triliun pada 2023, sementara Gorontalo hanya sebesar Rp5,92 triliun pada 2021 dan Rp6,11 triliun pada 2023. Perbedaan ini menggambarkan variasi tingkat aktivitas ekonomi, pendapatan, dan literasi keuangan antarwilayah, sehingga menarik untuk diteliti faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan dana masyarakat secara spasial dan temporal.

Beberapa variabel makroekonomi diduga memengaruhi besaran DPK, antara lain inflasi, suku bunga, pendapatan regional, dan belanja daerah. Inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi daya beli dan minat menabung masyarakat. Inflasi tinggi cenderung menekan DPK karena nilai riil uang menurun, sedangkan inflasi terkendali dapat mendorong pertumbuhan tabungan inflasi merupakan fenomena ekonomi yang mendorong peningkatan harga secara menyeluruh dan dapat memengaruhi keputusan ekonomi individu (Lengkong, et al 2019). Suku bunga tabungan berperan sebagai kompensasi atas dana yang disimpan di bank; semakin tinggi suku bunga, semakin besar insentif masyarakat untuk menabung. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung mendorong masyarakat untuk meningkatkan tabungan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh perbankan (Wirakusuma and Dewanti 2023).

Selanjutnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kapasitas ekonomi daerah yang berkaitan langsung dengan potensi tabungan masyarakat. Provinsi DKI Jakarta mencatat peningkatan PDRB harga konstan dari Rp1.856.240 miliar pada 2021 menjadi Rp2.050.465 miliar pada 2023, sementara Gorontalo meningkat dari Rp29.107 miliar menjadi Rp31.647 miliar. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi riil yang berpotensi meningkatkan penghimpunan DPK.

Selain itu, belanja daerah menjadi instrumen fiskal yang turut memengaruhi likuiditas dan aktivitas ekonomi wilayah. Peningkatan belanja pemerintah daerah berpotensi menambah perputaran uang di masyarakat dan mendorong kenaikan DPK di perbankan. Namun, data menunjukkan adanya disparitas kapasitas fiskal antarprovinsi, seperti belanja daerah DKI Jakarta sebesar Rp84.196 miliar pada 2021 dan Gorontalo hanya Rp1.922 miliar.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh variabel makroekonomi terhadap DPK. Qoni dan Seno Aji (2021) menemukan bahwa BI-7DRR berpengaruh signifikan terhadap DPK di Jawa Timur, sementara PDRB tidak berpengaruh. Sebaliknya, Luwihadi dan Arka (2017) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap tabungan di Sulawesi Utara, tetapi inflasi dan suku bunga tidak signifikan. Penelitian Sugiharti et al. (2021) serta Rahman dan Setiawansi (2021) juga menemukan variasi hasil

antarwilayah. Inkonsistensi temuan ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik ekonomi dan perilaku keuangan masyarakat di tiap daerah, sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan data panel antarprovinsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan Dana Pihak Ketiga sebagai proksi jumlah uang beredar di Indonesia dengan menggunakan data panel 34 provinsi periode 2019–2023. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dalam memahami pengaruh variabel makroekonomi dan fiskal terhadap penghimpunan dana masyarakat di sektor perbankan serta menjadi bahan pertimbangan kebijakan bagi penguatan stabilitas moneter dan inklusi keuangan regional.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Dana Pihak Ketiga**

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Berdasarkan pendekatan umum sumber, dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, deposito berjangka, dan tabungan merupakan sumber pendanaan bank yang paling banyak digunakan dan sebagian besar disalurkan kemudian digunakan sebagai kredit bank (Pattipeilohy and Rahayu 2023). Menurut Mishkin (2019), bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak yang surplus ke pihak yang defisit. Semakin besar DPK, semakin besar pula kemampuan bank menyalurkan kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

### **Inflasi**

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode (Bank Indonesia, 2022). Inflasi mengurangi daya beli uang dan memengaruhi perilaku konsumsi serta tabungan masyarakat. Menurut teori kuantitas uang Irving Fisher ( $MV = PQ$ ), jumlah uang beredar ( $M$ ) berbanding lurus dengan tingkat harga ( $P$ ) ketika kecepatan uang ( $V$ ) dan output riil ( $Q$ ) relatif tetap. Kenaikan jumlah uang beredar tanpa peningkatan output menyebabkan inflasi. Dalam teori Keynes, inflasi dapat muncul karena ketidakseimbangan antara permintaan agregat ( $C + I + G$ ) dan penawaran agregat.

### **Suku Bunga Tabungan**

Suku bunga tabungan adalah imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabah atas simpanan mereka. Variabel ini menjadi insentif utama dalam keputusan menabung, meskipun besarnya relatif kecil dibanding deposito. Suku bunga yang kompetitif mendorong masyarakat menabung, sehingga meningkatkan DPK. jika bunga pinjaman meningkat, maka bunga simpanan juga cenderung akan naik, dan sebaliknya. (Rompas 2021). Menurut teori *loanable funds*, suku bunga ditentukan oleh interaksi antara tabungan (penawaran dana) dan investasi

(permintaan dana). Sedangkan dalam teori preferensi likuiditas Keynes, suku bunga merupakan “harga” atas kesediaan masyarakat menahan uang dalam bentuk kas.

### **Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah tersebut dalam periode waktu tertentu (Mudji 2018). Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi terciptanya lapangan kerja yang layak serta percepatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Indonesia (Fauziyah 2022). Secara teori, PDRB berhubungan erat dengan pendapatan masyarakat. Model pertumbuhan neoklasik Solow (1956) menyatakan bahwa peningkatan output dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, dan teknologi. Daerah dengan PDRB tinggi memiliki kapasitas ekonomi lebih besar sehingga potensi penghimpunan DPK juga meningkat, karena meningkatnya pendapatan dan kemampuan menabung masyarakat.

### **Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah belanja yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengakibatkan pengurangan saldo anggaran pada tahun anggaran yang bersangkutan tanpa dibayar oleh Pemerintah (Suhaedi 2019). Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Gagola et al., 2017) .

## **3. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data panel yang mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019–2023. Data yang digunakan diperoleh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta diperkuat dengan literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Variabel yang digunakan terdiri atas Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel dependen, sedangkan inflasi, suku bunga tabungan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan belanja daerah digunakan sebagai variabel independen. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan perkembangan tiap variabel di setiap provinsi, serta secara kuantitatif menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews. Model regresi yang digunakan diformulasikan sebagai:

$$DPK_{it} = \beta_0 + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 SB_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \beta_4 BD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

$DPK_{it}$  : Dana Pihak Ketiga ke-i pada tahun ke-t

$INF_{it}$  : Inflasi ke-i pada tahun ke-t

$S_{it}$	: Suku bunga tabungan ke-i pada tahun ke-t
$PDRB_{it}$	: Produk Domestik Regional Bruto ke-i pada tahun ke-t
$BD_{it}$	: Belanja Daerah ke-i pada tahun ke-t
$\beta_0$	: Konstanta/Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: Koefisien regresi
i	: Provinsi di Indonesia
t	: Waktu
$\varepsilon$	: Gangguan (Erro term)

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai, apakah Common Effect, Fixed Effect, atau Random Effect (Sugiyanto 2022). Setelah model terbaik ditetapkan, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF)  $< 10$  dan uji heterokedastisitas pada tingkat signifikansi 5%. Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap DPK, sedangkan uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial (Mubarak 2021). Selanjutnya, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi DPK di seluruh provinsi.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Uji Asumsi Klasik

###### *Uji Multikolinieritas*

**Tabel 1.** Uji Multikolinieritas.

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.089017	69.11617	NA
INF	0.000574	4.862903	1.183849
SB	0.041885	22.82733	1.172847
LOG(PDRB)	0.005215	111.4357	5.165326
LOG(BD)	0.009625	35.27333	5.175302

Sumber: Data Diolah (Eviews 12), 2025.

Seluruh nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.

***Uji Heteroskedastisitas*****Tabel 2.** Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.422767	0.263962	-1.601624	0.1112
INF	0.003242	0.003948	0.821231	0.4127
SB	-0.053738	0.033115	-1.622776	0.1065
LOGPDRB	0.150314	0.056887	2.642351	0.0090
LOGBD	0.034872	0.052036	0.670155	0.5037

Sumber: Data Diolah (Eviews 12), 2025.

Hasil uji diatas bahwa hanya variabel PDRB yang memiliki nilai prob lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan adanya indikasi heterokedastisitas pada variabel tersebut. Namun, karena sebagian besar variabel lain tidak signifikan, maka secara umum model regresi ini tidak mengalami masalah heterokedastisitas yang serius.

**Langkah Pemilihan Model*****Uji Chow*****Tabel 3.** Hasil Uji Chow.

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	177.044310	(33,132)	0.0000
Cross-section Chi-square	648.116066	33	0.0000

Sumber: Data Diolah (Eviews 12), 2025.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti model Common Effect tidak tepat digunakan, sedangkan model yang lebih sesuai adalah model Fixed Effect.

***Uji Hausman*****Tabel 4.** Hasil Uji Hausman.

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	1.0000

Sumber: Data Diolah (Eviews 12), 2025.

Nilai probabilitas (Prob.) sebesar 1,0000, yang jauh lebih besar daripada taraf signifikansi 5 persen ( $\alpha = 0,05$ ). Karena nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian adalah Random Effect Model (REM).

### Persamaan Regresi Model REM

Persamaan Regresi REM dapat dilihat di tabel 5.

**Tabel 5.** Hasil Regresi Model REM.

<b>Dependent Variable: LOGDPK</b>				
<b>Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)</b>				
<b>Date: 10/10/25 Time: 21:01</b>				
<b>Sample: 2019 2023</b>				
<b>Periods included: 5</b>				
<b>Cross-sections included: 34</b>				
<b>Total panel (balanced) observations: 170</b>				
<b>Swamy and Arora estimator of component variances</b>				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.326598	0.331180	-0.986163	0.3255
INF	0.002745	0.004235	0.648195	0.5178
SB	-0.238910	0.035736	-6.685370	0.0000
LOGPDRB	0.813685	0.068421	11.89238	0.0000
LOGBD	0.180769	0.056646	3.191184	0.0017
<b>Effects Specification</b>				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.480273	0.9745	
Idiosyncratic random		0.077761	0.0255	
<b>Weighted Statistics</b>				
R-squared	0.679439	Mean dependent var	0.290150	
Adjusted R-squared	0.671668	S.D. dependent var	0.144927	
S.E. of regression	0.083044	Sum squared resid	1.137880	
F-statistic	87.43085	Durbin-Watson stat	0.894250	
Prob(F-statistic)	0.000000			
<b>Unweighted Statistics</b>				
R-squared	0.852082	Mean dependent var	4.017597	
Sum squared resid	47.30002	Durbin-Watson stat	0.021513	

Sumber: Data Diolah (Eviews 12), 2025.

Berdasarkan tabel 4 hasil estimasi pada tabel tersebut dapat diketahui penjelasan masing-masing Variabel dalam penelitian yaitu INF (Inflasi), SB (Suku Bunga Tabungan), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga Kosntan), dan BD (Belanja Daerah) terhadap Dana Pihak Ketiga dapat dijelaskan persamaan model sebagai berikut:

$$\text{LOGDPK} = -0.326598 + 0.002745\text{INF} - 0.238910\text{SB} + 0.813685\text{LOGPDRB} + 0.180769\text{LOGBD}$$

Berdasarkan persamaan model diatas dapat dijelaskan hasil estimasi terhadap Random Effect Model diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Koefisien konstanta sebesar -0.3265 menunjukkan setiap s variabel inflasi, suku bunga, PDRB atas harga konstan dan belanja daerah tidak mengalami perubahan , maka nilai DPK pada tingkat dasar sebesar 6.5811.
- b. Koefisien variabel inflasi sebesar 0.0027 menunjukkan setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan meningkatkan DPK sebesar 0,27 persen.
- c. Koefisien variabel suku bunga tabungan sebesar -0.2389 menunjukkan setiap kenaikan suku bunga tabungan sebesar 1 persen akan menurunkan DPK 23,89 persen.
- d. Koefisien variabel PDRB sebesar 0.8136 menunjukkan setiap kenaikan PDRB sebesar 1 persen akan meningkatkan DPK 81,36 persen.
- e. Koefisien variabel belanja daerah sebesar 0.1807 menunjukkan setiap kenaikan belanja daerah 1 persen akan meningkatkan DPK sebesar 18,07 persen.

## **Uji Hipotesis**

### ***Uji F***

Berdasarkan tabel 5. hasil estimasi, diperoleh nilai F-statistic sebesar 87.43085 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000. Karena nilai probabilitas F-statistic lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen yang terdiri dari inflasi, suku bunga tabungan, PDRB harga konstan, dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

### ***Uji t***

Jika dilihat hasil uji t pada tabel 5. masing-masing variabel menunjukkan beberapa hal:

- a. Variabel Inflasi memiliki nilai probabilitas (t-statistik) lebih besar dari taraf signifikan  $\alpha$  5% ( $0.5178 > 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).
- b. Variabel suku bunga tabungan memiliki nilai probabilitas (t-statistik) lebih kecil dari taraf signifikan  $\alpha$  5% ( $0.0000 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan variabel suku bunga tabungan berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).
- c. Variabel PDRB memiliki nilai probabilitas (t-statistik) lebih kecil dari taraf signifikan  $\alpha$  5% ( $0.0000 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

- d. Variabel belanja daerah memiliki nilai probabilitas (t-statistik) lebih kecil dari taraf signifikan  $\alpha$  5% ( $0.0000 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan variabel belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

### **Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )**

Berdasarkan pada tabel 5. hasil estimasi, nilai R-squared sebesar 0,679495 menunjukkan bahwa sekitar 67% variasi Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu inflasi, suku bunga tabungan, PDRB harga konstan, dan belanja daerah. Sementara itu, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

### **Pengaruh Inflasi Terhadap Dana Pihak Ketiga**

Berdasarkan hasil penelitian inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Hasil ini mengindikasikan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Indonesia pada periode 2019–2023 relatif stabil sehingga tidak memengaruhi perilaku masyarakat dalam menabung. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan sari (2020) dan Putra (2021) yang menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK, namun berbeda dengan teori kuantitas uang Fisher yang menekankan bahwa inflasi dan jumlah uang beredar memiliki keterkaitan erat. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam konteks Indonesia, inflasi yang terkendali tidak menjadi determinan utama penghimpunan DPK.

### **Pengaruh Suku Bunga Terhadap Dana Pihak Ketiga**

Berdasarkan hasil penelitian suku bunga tabungan berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga dengan arah hubungan negatif. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rahman dan Setiawansi (2020) serta Pratama (2021) yang menemukan bahwa suku bunga tabungan dapat berpengaruh negatif terhadap DPK, karena masyarakat lebih responsif terhadap instrumen investasi non-bank dibandingkan simpanan tabungan. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa suku bunga tabungan bukanlah variabel utama yang menentukan DPK di Indonesia.

### **Pengaruh PDRB Harga Konstan Terhadap Dana Pihak Ketiga**

Berdasarkan hasil penelitian PDRB harga konstan berpengaruh positif signifikan terhadap dana pihak ketiga. Hasil ini sesuai dengan teori Keynes mengenai fungsi tabungan, yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan riil masyarakat, semakin besar pula

kemampuan untuk menabung setelah kebutuhan konsumsi terpenuhi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Lestari (2020) dan Andini (2022) yang menemukan hubungan positif signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan DPK. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah terbukti menjadi faktor fundamental yang memperbesar penghimpunan dana perbankan.

### **Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Dana Pihak Ketiga**

Berdasarkan hasil penelitian belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga. Secara teori, hasil ini sejalan dengan pandangan Keynesian yang menekankan bahwa pengeluaran pemerintah berperan sebagai stimulus fiskal yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong peredaran uang dalam perekonomian. . Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Yuliana (2021) dan Nugroho (2023) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap DPK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan instrumen fiskal penting yang mampu memperbesar penghimpunan dana perbankan di tingkat regional.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisis data penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan, perkembangan variabel-variabel penelitian di 34 provinsi Indonesia tahun 2019-2023 adalah rata-rata perkembangan Dana Pihak Ketiga tertinggi terdapat di provinsi Kalimantan Selatan sebesar 11,89 persen dan terendah terdapat di provinsi Banten sebesar -10,87 persen. Rata-rata perkembangan inflasi tertinggi terdapat di provinsi Jawa Timur sebesar 3,7 persen dan terendah terdapat di provinsi Papua sebesar 2,1 persen. Suku Bunga Tabungan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 1.17 persen dan terendah pada tahun 2022 sebesar 0.37 persen. Rata-rata perkembangan PDRB Harga Konstan tertinggi terdapat di provinsi Maluku Utara sebesar 16,41 persen dan terendah terdapat di provinsi Papua Barat sebesar 1,16 persen. Rata-rata perkembangan tertinggi terdapat di provinsi Maluku Utara sebesar 14,08 persen dan terendah terdapat di provinsi Papua Barat sebesar -17,24 persen. Berdasarkan hasil regresi variabel Suku Bunga, PDRB harga konstan dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan sedangkan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga.

## Saran

Melihat adanya perbedaan yang cukup besar antarprovinsi dalam perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK), inflasi, suku bunga tabungan, PDRB harga konstan, dan belanja daerah, pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih spesifik sesuai kondisi masing-masing daerah. Provinsi dengan potensi ekonomi tinggi seperti DKI Jakarta dapat menjadi motor penggerak, sementara daerah dengan capaian rendah seperti Sulawesi Barat atau Gorontalo memerlukan perhatian lebih melalui peningkatan investasi, penguatan kapasitas fiskal, serta perluasan akses layanan perbankan. Dengan kebijakan yang lebih terarah dan berbasis potensi daerah, kesenjangan antarprovinsi dapat ditekan dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengalokasikan belanja daerah secara lebih produktif agar dapat meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Perbankan sebaiknya tidak hanya mengandalkan instrumen suku bunga, tetapi juga memperkuat layanan, inovasi produk, serta literasi keuangan masyarakat. Sementara itu, karena inflasi terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK, stabilitas harga tetap perlu dijaga namun fokus kebijakan lebih diarahkan pada penguatan ekonomi riil dan efektivitas belanja daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, R. (2022). *Analisis pengaruh PDRB dan tingkat pendapatan masyarakat terhadap dana pihak ketiga perbankan*. *Jurnal Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah*, 8(2), 130–142.
- Fauziyah, S. (2022). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (DPK), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap perkembangan Sustainable Development Goals (SDGs)*. *E-QIEN Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 1428–1437. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/881>
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”*, 8(1), 108–117. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- Lengkong, N. L., Rumate, V. A., & Engka, D. S. M. (2019). *Pengaruh PDRB, inflasi dan suku bunga terhadap tingkat tabungan masyarakat pada Bank Sulutgo*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(5), 33–45. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19388.19.5.2018>
- Lestari, F. (2020). *Pertumbuhan ekonomi dan pengaruhnya terhadap penghimpunan dana pihak ketiga di perbankan konvensional Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 4(1), 55–67.
- Luwhihadi, N. L. G. A., & Arka, S. (2017). *Determinan jumlah uang beredar dan tingkat inflasi di Indonesia periode 1984–2014*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

- Mishkin, F. S. (2019). *The economics of money, banking, and financial markets*. Pearson Series in Economics.
- Mubarak, R. (2021). *Pengantar ekonometrika* (Edisi pertama).
- Mudji, A. (2018). *Analisa Produk Domestik Bruto (PDRB) Kota Malang*. *Pangripta*, 1(1), 35–46. <https://doi.org/10.58411/1mkxfv80>
- Nugroho, B. (2023). *Belanja daerah dan dampaknya terhadap penghimpunan dana pihak ketiga pada bank pembangunan daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 10(3), 99–112.
- Pattipeilohy, L. A., & Rahayu, Y. (2023). *Pengaruh permodalan dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap jumlah penyaluran kredit (Studi pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2021)*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(10), 1–15.
- Pratama, Y. (2021). *Hubungan antara suku bunga, inflasi, dan preferensi masyarakat terhadap instrumen investasi*. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Keuangan*, 9(2), 88–99.
- Putra, A. R. (2021). *Analisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penghimpunan dana pihak ketiga di perbankan syariah*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(1), 23–35.
- Qoni'ah, A., & Aji, T. S. (2021). *Pengaruh BI7DRR dan PDRB terhadap dana pihak ketiga bank umum Jawa Timur*. *Independent: Journal of Economics*, 1(3), 146–167. <https://doi.org/10.35194/arps.v1i2.1808>
- Rahman, A. F., & Setiawansi, Y. (2021). *Analisis determinan dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 154–163. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1608>
- Rompas, W. F. I. (2021). *Analisis pengaruh tingkat suku bunga dan nilai tukar terhadap permintaan kredit pada perbankan di Kota Manado*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(2), 204–215.
- Sari, D. P. (2020). *Pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap dana pihak ketiga pada bank umum di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 35(2), 145–156.
- Sugiharti, E. S., Wulandari, N. S., & Al Adawiyah, R. A. (2021). *Analisis pengaruh inflasi, produk domestik bruto dan bagi hasil terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah tahun 2014–2019*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 78–93. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i2.2557>
- Sugiyanto, E. S., Nugroho, W. C. A., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). *Konsep dan praktik ekonometrika menggunakan EViews*. Academia Publication.
- Suhaedi, W. (2019). *Analisis belanja daerah*. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63–78. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v18i2.82>
- Wirakusuma, F. A., & Dewanti, D. S. (2023). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar di Indonesia dengan pendekatan Vector Autoregressive Model (VAR) tahun pengamatan 1990–2020*. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i1.19>
- Yuliana, E. (2021). *Pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja perbankan di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Fiskal*, 7(1), 45–58.